

**PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SEKAT KANAL DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

Warqah Hasibuan¹

¹Dinas Kehutanan Provinsi Riau

wargah-hasibuan@riau.go.id

*Corresponding author: *E-mail:* wargah-hasibuan@riau.go.id

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 25/Juni/2024

Direvisi 27/Juni/2024

Diterima 28/Juni/2024

Cite : Hasibuan W,
2024, *Pendampingan
Masyarakat dalam
Pembuatan Sekat Kanal
di Kabupaten kepulauan
Meranti. Jurnal SAKAAI,
Volume 01, Nomor 01,
2024 pp. 58-66*

DOI : -

Abstrak

Studi ini membahas proses pembangunan sekat kanal dan pendampingan masyarakat lokal di Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Sekat kanal dibangun untuk menjaga ekosistem gambut tetap basah atau mencegah hilangnya kandungan air pada lahan gambut. Studi ini dilaksanakan secara kualitatif, dengan metode pengambilan data secara observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi observasi. Verifikasi data dilakukan dengan cara uji Kredibilitas yaitu dengan menemukan persamaan antara apa yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan mengumpulkan data-data untuk kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk mengetahui masalah yang ada. Studi ini menemukan bahwa pembangunan sekat kanal yang dilakukan BRG dan Pemerintah pusat pada tahun 2017-2019 belum melakukan sosialisasi maupun pendampingan masyarakat secara efektif. Pendampingan masyarakat lokal menuju kemandirian terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan sekat kanal yang telah dibangun. Pendampingan yang tepat menghasilkan masyarakat yang mandiri dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul baik pada saat pelaksanaan, maupun saat setelah pelaksanaan pembangunan sekat kanal. Masyarakat mandiri juga terbukti mampu menyelesaikan permasalahan diluar perkiraan lainnya yang timbul akibat pembangunan sekat kanal. Hasil studi ini berkontribusi terhadap kajian restorasi gambut, pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) sekat kanal, dan menjadi masukan dalam melaksanakan pendampingan masyarakat dengan menjadikan masyarakat mandiri dalam melakukan pengelolaan IPG pada masing-masing wilayahnya.

Kata Kunci: Sekat Kanal, Pendampingan Masyarakat, Restorasi Gambut

Abstract

This study discussed the process of building canal blocks and supporting local communities on Tebing Tinggi Island, Meranti Islands Regency, Riau. Canal blocks are built to keep the peat ecosystem wet or to prevent the loss of water content in peatlands. Dry peatlands are at risk of fire and land subsidence. This research study was carried out qualitatively, using data collection methods through observation, interviews and analysis of observational documentation. The data is verified by a credibility test, i.e. finding similarities between what is reported and what actually happens in the field. Data is analysed descriptively by collecting data which is then collated, processed and analysed to identify problems. The study found that the construction of canal blockages, carried out by the BRG and the central government between 2017 and 2019, did not provide effective socialisation or community support. Supporting local communities to become self-reliant has proven to have a significant impact on the sustainability of the canal blocks that have been built. With the right support, communities become independent and are able to solve problems that arise during and after the construction of the canal block. Self-reliant communities have also proven to be able to solve other unexpected problems that arise as a result of canal block construction. The results of this study contribute to the study of peat restoration, the construction of canal blocking peat wetting infrastructure (IPG), and provide input for the implementation of community support by making communities independent in the management of IPG in their respective areas.

Keywords: Canal blockage, community support, peat restoration



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Pada skala internasional gambut memiliki isu lingkungan yang semakin mendapatkan perhatian. Ekosistem gambut memiliki peranan kunci dalam isu perubahan iklim karena berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon alami, serta dapat membantu mempengaruhi siklus air dan cuaca. Pelepasan karbon dari ekosistem gambut yang terdegradasi atau terbakar berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Pelestarian dan restorasi ekosistem ini dapat membantu mencegah resiko bencana alam seperti banjir dan badai, serta membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menyimpan lebih banyak karbon dalam tanah gambut.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ekosistem gambut. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, luas lahan Gambut Indonesia mencapai 13,9 juta hektar. Dalam data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2018, luasan lahan gambut di Riau mencapai 5,09 juta ha atau setara 56,42% total lahan gambut yang terdapat di pulau Sumatera yang memiliki potensi menyimpan karbon sebesar \pm 14.605 juta ton. Dari luasan tersebut Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah dengan potensi gambut yang besar.

Kesadaran akan urgensi perlindungan, pemulihan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagai bentuk mitigasi terhadap perubahan iklim semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk memutuskan kebijakan dan rencana kerja yang menangani restorasi gambut. Dalam rangka pemulihan dan pengelolaan ekosistem gambut ada beberapa Upaya yang dapat dilakukan diantaranya: menjaga kebersihan (*Rewetting*), pemulihan tutupan lahan (*Revegetation*), dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat (*Revitalization of local livelihood*).

Rewetting dengan pembangunan Infrastruktur Restorasi Gambut (IRG) berupa sekat kanal. Pembangunan IRG sekat kanal ini akan menggunakan pendanaan yang diturunkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam rentang 2021-2024, Badan Restorasi Gambut mendapat amanat untuk melakukan restorasi lahan gambut dengan total 1.200.000 ha. Pada tahun 2024, periode 1 Januari – 31 Desember, kegiatan restorasi gambut dan mangrove mendapatkan bantuan dana APBN sebesar Rp.321.384.038.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Anggaran inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan restorasi gambut dan dan rehabilitasi mangrove. Dengan alokasi tersebut, ditargetkan tercapainya restorasi gambut seluas 355.000 hektar pada tahun 2024. Salah satu penggunaan pendanaan tersebut adalah untuk Pembangunan infrastruktur Restorasi Gambut *Rewetting* atau pembangunan sekat kanal. Penggunaan dana APBN ini dalam penerapannya haruslah tepat sasaran dan efektif sehingga segala upaya yang telah dilakukan dapat terjadi keberlangsungannya.

Di Beberapa negara lain yang memiliki kekayaan dengan wilayah ekosistem gambut juga menyadari betapa pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem gambut tersebut. Peru adalah salah satu contoh negara yang juga memiliki lahan gambut dan melakukan upaya restorasi lahan gambut untuk menjaga ekosistem dan keberlanjutan lahan gambut tersebut. Dennis del Castillo, direktur Tata Kelola Hutan dan Program Jasa Lingkungan Institute Penelitian Amazon Peru (IIAP) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara kondisi lahan gambut Indonesia dengan lahan gambut yang menjadi wilayah studinya di Peru. Indonesia menghadapi permasalahan restorasi gambut berupa kebakaran dan degradasi akibat invasi Perkebunan kelapa sawit yang cukup massif. Di Peru lahan gambut adalah tempat tumbuh yang baik bagi pohon *Aguaje* yang menghasilkan buah dengan cita rasa lezat. Pohon *Aguaje* memberikan nilai ekonomi, pangan dan keragaman hayati. Di Peru sendiri kebakaran lahan gambut bukanlah hal utama yang menjadi permasalahan restorasi gambut, karena di Peru pendekatannya adalah menyelamatkan lahan gambut karena sudah memberikan hasil seperti buah *Aguaje*, Ikan, Kayu dan lain-lain. Pendekatan yang dilakukan Peru dalam upaya restorasi gambutnya adalah bagaimana menjaga dan mengelola lahan gambut yang kaya akan buah *Aguaje*, ikan dan kayu

tersebut. Masyarakat perlu menjaga ekosistem gambut atas kesadaran bahwa disanalah letak ekonomi mereka berada. Menjaga lahan gambut bagi mereka bukan hanya membantu ekonomi masyarakat lokal tapi juga nasional.

Sementara di Indonesia dalam pelaksanaannya salah satu upaya restorasi gambut adalah dengan Teknik *Rewetting* yang dilakukan dengan Pembangunan sekat kanal. Upaya restorasi dengan pembasahan kembali menggunakan pembangunan sekat kanal sering kali menghadapi tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. Penolakan Pembangunan sekat kanal seringkali terkendala karena bagi masyarakat pembangunan kanal bertujuan untuk mengeringkan gambut sehingga dapat dibudidayakan, selain itu kanal-kanal juga dimanfaatkan sebagai jalur navigasi baik transportasi masyarakat ataupun hasil panen sehingga upaya restorasi kerap bertentangan dengan keinginan pihak setempat. Ada banyak hal yang berpengaruh terhadap kesuksesan restorasi gambut, selain Pembangunan Infrastruktur pembasahan gambut berupa sekat kanal, penimbunan kanal, sumur bor dan lainnya, perlu juga untuk didukung melalui penguatan pada aspek sosial dan kelembagaan sehingga manfaat restorasi dapat berkelanjutan.

Pendampingan terhadap masyarakat setempat lokasi pembangunan sekat kanal harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan bangunan tersebut. Dalam jurnal ini akan membahas mengenai upaya pendampingan masyarakat dalam pembuatan sekat kanal di Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan pendataan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018, dari 5 kecamatan yang dilakukan pendataan tercatat ada 480 lebih kanal dengan panjang ribuan kilometer di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga diperkirakan membutuhkan 3200 sekat kanal untuk mengatur debit air pada lahan gambut. Data tersebut belum termasuk jumlah kanal di 4 kecamatan lainnya sehingga Kab. Kepulauan Meranti berpotensi menjadi daerah dengan pembangunan sekat kanal terbanyak di provinsi Riau.

Program implementasi pembangunan sekat kanal sebagai upaya rewetting lahan gambut sudah banyak dibangun pada daerah-daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembangunan sekat kanal dengan menggunakan pendanaan dari berbagai macam sponsor seperti pemerintah pusat, BRG hingga pelaku swasta menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah. Bagaimanakah upaya pendampingan masyarakat yang telah dilakukan dalam proses pembangunan sekat kanal tersebut?, dan seberapa efektif program pendampingan yang telah dilakukan?. Topik pendampingan masyarakat dalam upaya restorasi gambut dengan pembangunan sekat kanal akan dibahas dalam jurnal ini.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini disusun berdasarkan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan analisis dokumentasi observasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain untuk memahami situasi di masyarakat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat sekitar lokasi pembangunan sekat kanal melalui via telepon. Analisis dokumentasi observasi yang sebelumnya telah dilaksanakan dilakukan dengan mencari sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan program pembangunan sekat kanal

TEMUAN DAN DISKUSI

a. Program Pembangunan Sekat Kanal

Upaya restorasi gambut yang dilakukan dengan pembangunan fasilitas sekat kanal salah satunya terdapat pada Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sekat kanal di Desa Lukun ini dibangun oleh Badan Restorasi Gambut yang merupakan program untuk mencegah dan menangani kebakaran lahan gambut dengan tetap menjaga kelembaban lahan gambut tersebut. Sekat kanal ini dibangun untuk menciptakan ruang wilayah

penahan air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air jika terjadi kebakaran atau juga dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan lainnya.

Bersama masyarakat Desa Lukun, Universitas Riau dan Badan Restorasi Gambut, selama tahun 2017 telah dilakukan Pembangunan 7.857 infrastruktur lahan basah dan 7.747 diantaranya dibangun Bersama masyarakat yang hidup di lahan gambut. Hasil pembangunan sekat kanal pada Desa Lukun dinilai belum dilakukan secara efektif. Menjelang akhir tahun 2020, Pantau Gambut melakukan upaya penilaian keefektifan pembangunan sekat kanal yang dilakukan oleh BRG pada pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penilaian yang dilakukan Pantau Gambut terhadap proyek restorasi gambut BRG yang bernilai miliaran rupiah menemukan hasil bahwa sekat kanal yang dilakukan pembangunan pada tahun 2017-2019 tersebut mengalami banyak kerusakan. Temuan kerusakan sekat kanal mulai dari kerusakan 60% hingga kerusakan 100% atau rusak total. Kejadian kebakaran berulang juga terjadi di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur baik sebelum pembangunan sekat kanal maupun setelah pembangunan sekat kanal. Hal ini sangat amat disayangkan karena pembangunan sekat kanal yang memakan dana miliaran justru tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kerusakan sekat kanal di desa lainnya juga diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Frengky, salah satu warga desa yang bekerja di kantor Desa Sungai tohor. Menurutnya pada tahun 2014, terdapat pembangunan 11 unit sekat kanal yang berasal dari Presiden RI dengan 10 di antara bangunan sekat kanal berbahan kayu dan 1 unit sekat kanal berbahan beton atau permanen. Dari 11 sekat kanal tersebut saat ini hanya tinggal 1 unit yang masih beroperasi yaitu yang dibangun menggunakan beton, sementara 10 lainnya sudah rusak total. Pada tahun 2018-2019 terdapat pembangunan sekat kanal oleh BRG dengan jumlah sekitar 20 unit dengan bahan kayu bulat. Saat ini tidak ada satupun sekat kanal dari BRG yang masih beroperasi dengan baik karena sudah rusak diatas 80%. Menurut hasil wawancara tersebut kerusakan sekat kanal disebabkan karena bahan baku yang digunakan berbahan kayu sehingga perkiraan umur bangunan hanya sekitar 3-5 tahun saja. Tanpa perawatan umur bangunan sekat kanal bisa jadi lebih singkat.

Pada tahun 2022 juga terdapat sebuah kasus dimana Pembangunan sekat kanal menyebabkan terputusnya akses transportasi Desa Lukun- Sungai Tohor akibat terendahnya badan jalan setinggi lutut orang dewasa yang diakibatkan oleh pembangunan sekat kanal. Berdasarkan informasi yang dimuat halloriau.com, sejumlah titik di ruas jalan poros Desa Lukun-Sungai Tohor rutin tergenang banjir yang diakibatkan luapan kanal yang ada di daerah tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala desa Sungai Tohor yang dimuat dalam laman berita halloriau.com menyebutkan bahwa banjir disebabkan karena titik pembangunan sekat kanal yang tidak tepat dan terdapat sekat kanal yang tidak memiliki pintu air sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengaturan debit muka air saat musim hujan.

Dalam upaya penanganan tersebut masyarakat dan pemerintah desa meminta Solusi dari pemerintah setempat dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang memiliki wewenang terhadap pembangunan sekat kanal tersebut. Permasalahan diselesaikan dengan melakukan rehabilitasi tali air sehingga pada saat curah hujan tinggi wilayah kanal dapat berbagi tinggi muka air sehingga tidak meluap ke jalan. Rehabilitasi tali air dilakukan secara gotong royong dengan memberdayakan pemuda dan masyarakat setempat.

Tidak efektifnya pembangunan sekat kanal ini menurut Fandi Rahman, deputi WALHI Riau menilai bahwa upaya restorasi gambut dengan pembangunan sekat kanal haruslah mempertimbangkan hal-hal seperti bahan baku yang digunakan untuk bangunan sekat kanal, melakukan perbaikan sekat yg telah ada sebelum melakukan pembangunan sekat kanal baru, mempertimbangkan ketepatan titik untuk pembangunan sekat kanal, membangun sekat kanal dengan perhitungan matang yang dilengkapi dengan pintu kanal yang bisa dibuka tutup demi menjaga muka air saat musim kemarau maupun musim hujan. Pendampingan masyarakat desa

wilayah pembangunan sekat kanal yang tidak efektif menjadi pr yang harus segera diselesaikan, hal ini menyangkut pada keberlanjutan fungsi sekat kanal itu sendiri.

b. Pendampingan Masyarakat Dalam Pembangunan Sekat Kanal

Penolakan Pembangunan sekat kanal seringkali terkendala karena bagi masyarakat pembangunan kanal bertujuan untuk mengeringkan gambut sehingga dapat dibudidaya, selain itu kanal-kanal juga dimanfaatkan sebagai jalur navigasi baik transportasi masyarakat ataupun hasil panen sehingga upaya restorasi kerap bertentangan dengan keinginan pihak setempat. Dalam wawancara dengan salah satu warga desa di Kecamatan Tebing tinggi Timur Bernama Yadi yang dilakukan melalui via telephone, pembangunan sekat kanal pada mulanya mendapat tentangan dari masyarakat karena akan menghambat penggunaan kanal sebagai jalur pengangkutan hasil panen batang sagu. Masyarakat petani sagu di Desa Lukun biasanya membawa batang (tual) sagu hasil panen dengan memanfaatkan air pada kanal-kanal yang terdapat di lahan gambut. Dengan adanya sekat kanal, proses pengangkutan tual sagu melalui kanal akan terhambat akibat adanya bangunan sekat kanal tersebut. Hal serupa juga didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Frengky yang menyebutkan bahwa masyarakat yang mengambil hasil hutan berupa kayu juga keberatan dengan pembangunan sekat kanal ini. Kanal digunakan untuk membawa kayu-kayu melalui air, berbeda dengan tual pohon sagu yang mengapung saat di air, kayu-kayu yang diambil masyarakat ini cenderung tenggelam saat di air, sehingga pembangunan sekat kanal akan menghambat pekerjaan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun.

Menurut bapak Yadi yang merupakan warga Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, saat ini masih terdapat oknum masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran atau pengrusakan sekat kanal karena menghambat kepentingan mereka dalam mencari nafkah dan berpendapat bahwa sekat kanal adalah salah satu penyebab banjir di Desa mereka. Dalam wawancara tersebut juga diperoleh informasi bahwa proses pembangunan sekat kanal yang dilakukan BRG pada tahun 2017-2019 belum melakukan pendampingan masyarakat secara tepat, beliau menilai BRG hanya melakukan komunikasi dengan petinggi desa terkait tanpa melakukan sosialisasi pada masyarakat yang memanfaatkan kanal-kanal gambut. Pembongkaran atau pengrusakan sekat kanal oleh oknum masyarakat sering kali terdapat pada titik-titik yang dinilai pak Yadi tidak tepat titik pembangunannya. Sehingga kerusakan oleh oknum masyarakat tidak dapat dihindari.

Pembangunan sekat kanal tanpa melakukan edukasi pada masyarakat setempat hanya akan menimbulkan pekerjaan yang sia-sia. Peran aktif masyarakat setempat sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan pembangunan dan pengoperasian sekat kanal. Pendampingan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal bertujuan untuk memberikan rasa kepemilikan infrastruktur oleh masyarakat sehingga muncul rasa ingin melindungi serta merawat infrastruktur tersebut. sosialisasi yang tepat juga akan menimbulkan rasa menguntungkan dari masyarakat lokal terhadap keberadaan sekat kanal tersebut.

Menurut informasi yang didapatkan dari Bapak Zuri sebagai pengusaha pabrik sagu yang terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi, pembangunan sekat kanal belakangan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada petani pohon sagu. Hal ini dikarenakan wilayah lahan gambut yang akan dibangun sekat kanal umumnya adalah berupa kebun pohon sagu. Sosialisasi pada petani sagu ini menghasilkan pembangunan sekat kanal yang tetap mengedepankan fungsinya sebagai pembasahan lahan sekaligus tidak berdampak merugikan pada petani sagu dalam proses pemanenan pohon sagu. Sekat kanal dibangun dengan lebar pintu sekat yang sesuai dengan ukuran tual sagu sehingga tual sagu yang dipanen dapat melewati sekat kanal tanpa kendala. Pembangunan sekat kanal juga dilengkapi pintu buka tutup sehingga pada saat masyarakat ingin melewati sekat tersebut, pintu sekat kanal dapat dibuka dan kemudian ditutup kembali saat selesai digunakan. Pembangunan sekat kanal untuk menjaga

pasokan air lahan gambut ternyata juga berdampak pada kualitas hasil pohon sagu yang dipanen, ukuran pohon lebih besar dan tinggi jika proses pertumbuhannya mendapat pasokan air yang cukup. Temuan ini mendukung betapa pentingnya pendampingan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal.

Dalam upaya pendampingan masyarakat wilayah gambut harus diiringi dengan upaya peningkatan atau pemulihan ekonomi masyarakat atau revitalisasi mata pencaharian masyarakat (*Revitalization of local livelihood*) yang dapat mendukung program ketahanan pangan nasional. Salah satu contoh revitalisasi mata pencaharian adalah dengan memberikan alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan oleh warga desa yang sebelumnya mengambil hasil hutan berupa kayu dengan mendirikan program desa mandiri, pembekalan pertanian lahan gambut, perikanan, hingga penyediaan air bersih. Revitalisasi mata pencaharian masyarakat yang awalnya melakukan panen hasil hutan berupa kayu juga akan berdampak pada keberlangsungan sekat kanal yang telah dibangun, hal ini sesuai informasi yang didapatkan dari pak Yadi bahwa oknum masyarakat yg sengaja melakukan pembongkaran atau perusakan sekat kanal umumnya dilakukan masyarakat yang memanen hasil hutan berupa kayu. Revitalisasi mata pencaharian juga akan menghindari lahan gambut dari degradasi hutan akibat penebangan yang dilakukan.

Pada konsep pembangunan sumber daya manusia dikenal sejumlah pendekatan yang berorientasi kepada optimalisasi partisipasi masyarakat. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat, pembangunan manusia, dan pendekatan berbasis kepada masyarakat menuju proses kemandirian masyarakat. Pendampingan masyarakat sekat kanal pada prinsipnya berorientasi pada prinsip kolaborasi/kemitraan, pembangunan manusia seutuhnya, dan berbasis pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan sekat kanal, pengorganisasian masyarakat salah satunya dengan membentuk pemuda-pemudi peduli gambut, dan pembangunan manusia dilakukan dengan memberikan edukasi atau pendidikan terkait manfaat dan pentingnya sekat kanal. Di Desa Lukun sendiri terdapat perkumpulan karang taruna yang berperan aktif terhadap keberlanjutan program sekat kanal yang telah dibangun.

Adanya pengorganisasian masyarakat akan mempermudah tahapan perawatan sekat kanal yang disarankan untuk dilakukan pembersihan minimal 1 tahun sekali, hal ini untuk memperpanjang umur bangunan dan memastikan fungsinya berjalan secara optimal. Dengan adanya masyarakat peduli tersebut, kegiatan gotong royong pembersihan dan perawatan kanal dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tanpa harus menunggu keterlibatan instansi pemerintah.

Salah satu contoh kegiatan yang dapat menjadi role model dalam pendampingan masyarakat adalah seperti yang dilakukan oleh LSM Ekonomi Kreatif Andalan (LSM EKA) yang terdapat di Desa Sungai Tohor. LSM ini dibentuk oleh pemuda pemudi setempat dan aktivis lingkungan yang peduli terhadap kelestarian ekosistem gambut. Menggaet pemuda pemudi lokal sebagai anggota LSM menjadi point kunci yang dapat dilakukan di daerah lainnya. LSM EKA memiliki program kerja berupa pembangunan sekat kanal dan perawatan sekat kanal setiap tahunnya. Pembangunan sekat kanal yang dilakukan LSM EKA berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan wirausaha LSM berupa penjualan madu dan juga penjualan bibit tanaman pohon untuk proses reboisasi hutan gambut. Selain memberikan kesempatan revitalisasi pekerjaan kepada masyarakat lokal, LSM ini juga berhasil mempertahankan fungsi sekat kanal yang telah dibangunnya dengan melakukan kegiatan gotong royong rutin pemeliharaan sekat kanal. Berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara dengan bapak Franky, LSM Eka sejak tahun 2017-2024 sudah berhasil membangun 23 sekat kanal yang tersebar di desa Sungai Tohor. Hingga saat ini sekat kanal dari LSM EKA adalah jumlah terbanyak yang masih bertahan

fungsinya hingga saat ini. Sementara sekat kanal yang dibangun BRG dan Presiden RI rata-rata sudah tidak berfungsi optimal karena kerusakan parah hingga kerusakan total.

c. Pendampingan Dengan Model Pemandirian Masyarakat

Pendampingan untuk memberdayakan masyarakat gambut diartikan sebagai rangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Strategi unggulan untuk mencapai kemandirian masyarakat adalah dengan melakukan pemberdayaan. Adapun Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi mitra kerja
Dengan mengedepankan prinsip kolaborasi atau kemitraan. Komitmen ini diwujudkan dengan instansi terkait di tingkat provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa. Kemitraan dapat dilakukan dengan penandatanganan kerjasama antar kedua belah pihak.
- b. Seleksi calon fasilitator masyarakat
Ujung tombak program ini adalah fasilitator masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan fasilitator masyarakat yang memiliki kapasitas, integritas, kepedulian terhadap masyarakat dan misi program, dan bersedia bekerjasama dengan masyarakat penerima manfaat program. Fasilitator masyarakat dapat juga dipilih dengan melakukan seleksi.
- c. Pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator masyarakat dan mitra kerja
Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kebijakan, pemahaman data dan tata kelola yang akan dilaksanakan, membekali keterampilan pemilihan opsi program, keterampilan penyusunan rencana hingga keterampilan pengorganisasian kerja.
- d. Memberikan tanggung jawab kerja terhadap masing-masing pihak yang telah ditunjuk atau terpilih
- e. Pendampingan penyusunan perencanaan program
- f. Pemilihan opsi program
- g. Penyusunan rencana kerja masyarakat

Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sekat kanal akan bergantung pada kesuksesan penerapan strategi yang telah direncanakan. Pendampingan menuju kemandirian ini dinilai strategis karena merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat dan juga pemerintah dalam implementasi atau pelaksanaan di lapangan. Program kemandirian ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar akan tetapi bila dirutinkan pasti akan mendapatkan hasil dan mencapai target secara optimal. Dengan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu mengambil Keputusan terhadap setiap permasalahan yang akan terjadi terhadap keberlanjutan sekat kanal tersebut.

d. Diskusi

Idealnya pendampingan masyarakat dilakukan secara profesional, dengan penuh tanggung jawab dan komitmen penuh. Kesiapan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan program sekat kanal sangat bergantung pada bagaimana proses atau upaya pembentukan kemandirian masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap terhadap tujuan dan target program harus tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan gambut mampu berperan aktif dalam keberlanjutan program tersebut. tidak adanya tujuan yang

sama dari masyarakat memungkinkan munculnya pemikiran yang bertolak belakang dengan tujuan awal pembangunan sekat kanal.

Pendampingan masyarakat sekat kanal haruslah dilakukan oleh ahlinya sehingga tidak terjadi pelencengan program yang justru tidak bermanfaat pada keberlangsungan sekat kanal. Rekrutmen fasilitator masyarakat merupakan titik krusial yang harus dilakukan oleh seseorang dengan keterampilan dan ilmu tentang program restorasi gambut dan pembangunan sekat kanal. Pelatihan atau pengedukasian terhadap masyarakat harus dilakukan semaksimal mungkin dengan harapan dapat memunculkan rasa saling memiliki oleh masyarakat sehingga terwujud penjagaan fasilitas bersama.

Sebagai salah satu contoh, dengan adanya pendampingan menuju kemandirian masyarakat di Desa Lukun Kabupaten Kepulauan Meranti, mereka akan mampu mengambil Keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan terjadinya luapan air dari kanal akibat sekat kanal dengan melakukan perawatan dan rehabilitasi tali air. Keputusan-keputusan seperti inilah yang diharapkan mampu dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang berada disekitar sekat kanal. Contoh lainnya adalah dengan adanya kekompakan masyarakat desa dalam melakukan gotong royong perawatan atau pembersihan sekat kulan sekali setahun yang berguna untuk memperpanjang umur bangunan serta memastikan fungsinya berjalan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang didapatkan, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pembangunan sekat kanal yang telah dilakukan belum melakukan pendampingan masyarakat secara tepat, sehingga tidak tercapai kepentingan bersama. Hal ini berdampak pada adanya kasus pengerusakan hingga pembongkaran sekat kanal oleh oknum masyarakat.
- b. Pembangunan sekat kanal harus mencapai fungsinya sebagai sarana pembasahan lahan gambut tanpa menghilangkan fungsi awal kanal oleh masyarakat setempat. Sosialisasi harus dilakukan dengan apik sehingga masyarakat dan pihak pembangun fasilitas mencapai kesepakatan dan tujuan yang sama di masa mendatang.
- c. Pendampingan masyarakat yang baik berdampak pada keberlangsungan sekat kanal. Hal ini terbukti dengan adanya pembentukan LSM EKA yang saat ini sekat kanal hasil pembangunan mereka adalah satu-satunya yang masih berfungsi secara optimal. Hal ini karena adanya program pengecekan rutin dan pemeliharaan bangunan sekat kanal.

DAFTAR BACAAN

- Agus, F., dan I.G. M. Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia.
- Alfarisyi, Sutikno, Rinaldi. 2020. Analisis Pembasahan Lahan Gambut akibat Pembangunan Sekat Kanal (Studi Kasus: Desa Lukun, Kabupaten Kepulauan Meranti). JURNAL TEKNIK- Vol.14, Nomor 1
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. 2024. RENCANA KERJA 2024 BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE. Jakarta: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
- Dohong, A., Cassiophea, L., Sutikno, S., Triadi, B., Wirada, F., Rengganis, P., & Sigalingging, L. (2017). Modul pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut Sekat Kanal Berbasis Masyarakat. Jakarta: Badan Restorasi Gambut.
- Erlina, N. (2017). Analisis Pembangunan Canal Blocking Sebagai Solusi Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Desa Sungai tohor Kabupaten Kepulauan Meranti. Jom FISIP

- Hidayati, N. (2018). Analisis Dampak Pembangunan Sekat Kanal Terhadap Fluktuasi Muka Air Tanah. Jom FTEKNIK
- Jamasy dan Suwendar. 2019. PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT BERBASIS PEMANDIRIAN MASYARAKAT. Jakarta: Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
- Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. 2017. "Dennis Del Castillo–GLF:Peatlands". Youtube Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
- Simanungkalit, Sadikin, Dhiaksa, Yakubison. 2018. "Penerapan sekat kanal (Canal Blocking) sebagai upaya restorasi lahan gambut terdegradasi pada kawasan EKS PLG Provinsi Kalimantan Tengah". Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bdan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- Zamzami, 2021. "Mengapa karhutla berulang di lokasi restorasi gambut di Pulau Tebing Tinggi, Riau?". Pantau Gambut.id